

**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN MEDIA *COOPERATIVE LEARNING*  
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 GUBUG  
KABUPATEN GROBOGAN)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada  
Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan**



**Disusun Oleh :**

**A H M A T R I F A I**

**NIM : Q 100070216**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka sudah seharusnya negara memajukan pendidikan nasional sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”  
(Anonim, 2006 : 5).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Anonim, 2006 : 5).

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tersebut ditegaskan kembali pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (2006 : 62), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 di atas, maka negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Pendidikan mempunyai peranan untuk mengintegrasikan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam sistem pendidikan. Menyimak sistem pendidikan nasional, paling tidak dapat diidentifikasi dalam tiga fungsi mendasar, yaitu : (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan tenaga terampil dan ahli, (3)

membina dan mengembangkan penguasaan teknologi (Djoyonegoro dalam Mantja, 2008 : 200).

Kehidupan bangsa dimaksud tidak terbatas pada kecerdasan intelektual saja, melainkan juga kecerdasan seluruh aspek kehidupan bangsa, seperti mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ketentuan ini terkait dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan umum, dan dapat diperolehnya pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan memegang peranan penting dalam mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menyediakan anggaran 20% dan bertanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Agar Indonesia memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang akan datang, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005–2025 Pemerintah merencanakan untuk meningkatkan kemampuan manusia bangsa ini, sehingga memiliki daya saing yang seimbang dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Anonim, 2006 : 5).

Selama ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Departemen Pendidikan nasional selaku penanggung jawab sistem pendidikan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, seperti menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2000-2009 yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Depdiknas menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Masyarakat Indonesia baru tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpengertian dan berwawasan global.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Ichsan, 2009).

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi

pendidikan tersebut. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan keseluruhan upaya yang dilaksanakan dalam bentuk pengajaran, pelatihan, bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional, institusional, kurikuler, intruksional) (Hamalik, 2008 : 31).

Upaya pencapaian tujuan negara dan tujuan pendidikan, maka perlu adanya pembenahan seluruh komponen yang mempengaruhi pendidikan. Komponen tersebut antara lain siswa, guru, sarana dan lingkungan. Sarana memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengajaran dengan model ceramah tidak cocok lagi dilaksanakan saat ini. Metode yang tepat dalam pengajaran dengan menggunakan media.

Peran guru tak hanya sebatas penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, ahli materi, dan sumber segala jawaban. Guru lebih sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator pengetahuan dan mitra belajar siswa. Guru pun lebih banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran (Febri, 2009)

Di era pendidikan berbasis TIK, peran Guru tidak hanya sebagai pengajar semata namun sekaligus menjadi fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah dan teman belajar bagi Siswa. Karenanya Guru dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk mengalami peristiwa belajar.

Memperhatikan dan melihat esensi dari fungsi / tujuan pendidikan nasional tersebut, sebaiknya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

harus mampu mempersiapkan, membina dan membentuk kemampuan peserta didik agar dapat menguasai pengetahuan, sikap, nilai dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat.

Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran harus didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif. Iklim pembelajaran yang dikembangkan oleh guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegairahan belajar para siswa di sekolah. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran (Solehatin, 2007 : 1).

Berdasarkan analisis konseptual dan kondisi pendidikan ternyata tidak sedikit siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah karena metode dan media pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh guru dirasakan kurang tepat. Dengan demikian, kemandirian siswa dalam belajar kurang terlatih dan proses belajar mengajar akan berlangsung secara kaku sehingga kurang mendukung pengembangan pengetahuan, sikap, moral, dan keterampilan siswa.

Dalam dunia pendidikan, paradigma lama mengenai proses belajar mengajar bersumber pada teori *tabula rasa* John Locke. Locke mengatakan bahwa pikiran seorang anak seperti kertas kosong yang putih bersih dan siap menunggu coretan-coretan gurunya. Dengan kata lain, otak seorang anak ibarat botol kosong yang siap diisi dengan segala ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan sang maha guru (Lie, 2008 : 2).

Kondisi proses belajar mengajar di sekolah masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan. Masih sedikit yang mengacu pada keterlibatan siswa dalam proses belajar itu sendiri. Pembelajaran hanya menekankan pada aspek kognitif semata, kurang melibatkan siswa sehingga siswa kurang mandiri dalam belajar, bahkan cenderung pasif (di ruang kelas siswa diam, dengar, dan catat).

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. Diantaranya adalah keterampilan membelajarkan dan keterampilan mengajar.

Guru dalam memilih model dan metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi siswa. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih media, model dan metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa, karena media, model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar yang dilakukannya.

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (Sudrajad, 2009).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah model *cooperative learning*.

Model pembelajaran ini berangkat dari pemikiran ”*getting better together*” yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana kondusif kepada siswa untuk memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat (Solihatin, 2007 : 2).



Selain itu kemajuan ilmu dan teknologi informasi juga telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pendidikan telah membara era baru perkembangan dunia pendidikan Indonesia, tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Hal ini lebih disebabkan masih tertinggalnya sumber daya manusia Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan tersebut.

Revolusi teknologi masa kini, khususnya komputer dan internet telah mengubah cara pandang dan berpikir secara praktis dan efisien pada masyarakat kita khususnya dan dunia pada umumnya. Kita semua dihadapkan pada ambang gerbang transisi yang berbasis teknologi, dimana kecepatan penyampaian dan menangkap suatu informasi menjadi sangat penting dalam rangka memajukan pendidikan.

Wardiman menyatakan bahwa pendidikan hendaknya dapat meningkatkan kreativitas, etos kerja, dan wawasan keunggulan peserta didik (Uno, 2007 : 99). Untuk meningkatkan kinerja pendidikan di masa mendatang diperlukan sistem informasi dan teknologi informasi yang tidak hanya sebagai sarana pendukung, tetapi lebih sebagai senjata utama untuk mendukung keberhasilan dunia pendidikan sehingga mampu bersaing di pasar global.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan serta

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan pola tradisional, karena cara ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Syukur, 2008 : 23).

Pendidikan saat ini membutuhkan dasar yang harus dibangun, yaitu mendasari posisinya sebagai penghasil jasa pendidikan (*produces*). Lembaga pendidikan harus memahami dengan baik kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks terutama diikuti oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Konsumen lembaga pendidikan yang paling kritis adalah dunia usaha.

Soedijarto menyatakan bahwa dalam menghadapi abad ke-21, ada tiga indikator utama dari hasil pendidikan yang bermutu dan tercermin dari kemampuan pribadi lulusannya, yaitu (1) kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan, (2) kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik dalam segi sosial budaya, dalam segi politik, dalam segi ekonomi, maupun dalam segi fisik biologis, dan (3) kemampuan untuk belajar terus pada pendidikan lanjutan (Uno, 2007 : 99).

Untuk menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, masalah yang harus ditanggulangi dalam proses pendidikan adalah mengelola lembaga pendidikan agar mampu memenuhi tuntutan pasar kerja, dan tidak menyisakan banyak pengangguran.

Hampir di setiap lembaga pendidikan telah tampak fenomena bahwa yang menjadi kriteria pilihan masyarakat saat ini adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki perangkat teknologi informasi sangat memadai dalam berbagai aktivitas operasional lembaga pendidikan tersebut. Hal itu disebabkan oleh salah satu unsur penilaian masyarakat tentang kualitas pendidikan saat ini dapat dilihat dari kemampuan sebuah lembaga pendidikan dalam menyajikan jasa pendidikan diantaranya menggunakan teknologi informasi (Rochaety, 2006 : 17).

Melihat kenyataan dan kemajuan teknologi pendidikan di era baru inilah, maka SMP Negeri 1 Gubug berupaya untuk berbenah dan

menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan masyarakat sekarang dengan memperbarui sistem pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktifitas siswa serta penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. SMP Negeri 1 Gubug yang merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, dengan berbagai prestasi baik akademik maupun non akademik. Sekolah ini menjadi sekolah rujukan bagi sekolah SMP di sekitarnya karena kelengkapan fasilitas dan segudang prestasi telah diraihinya. Siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah ini adalah siswa terpilih yang berasal dari desa-desa di kecamatan Gubug dan sekitarnya. Guru-guru yang mengajar sebagian besar telah memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola pembelajaran di kelas. Guru senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan berbagai upaya seperti mengikuti MGMP, studi banding, workshop, bintek, dan lain sebagainya. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan (Uno, 2007 : 15).

Upaya perbaikan sistem pendidikan di sekolah ini telah dilakukan semenjak bergulirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi, yaitu dengan membekali guru dengan berbagai kompetensi, perbaikan manajemen, peningkatan disiplin siswa, penciptaan budaya sekolah bagi warga sekolah, termasuk juga perbaikan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah dilakukan setiap tahunnya.

Tidak kalah pentingnya sekolah ini berupaya melengkapi sarana prasarana sekolah (media pendidikan) yang menunjang proses belajar

mengajar, seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium TIK, ruang multi media, sarana olah raga, kesenian, keterampilan, perpustakaan, dan lain-lain.

Mengenai media pendidikan dikatakan oleh Suwito dalam Suryosubroto (2004 : 115) adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan.

Sarana prasarana yang telah disiapkan oleh sekolah, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan inovasi guru dalam memilih dan menggunakan media dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian prestasi dan kompetensi siswa dapat tercapai.

Perubahan sistem pendidikan yang terjadi ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Gubug tentang Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Media *Cooperative Learning*.

## **B. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah karakteristik pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning* di SMP Negeri 1 Gubug. Fokus tersebut dijabarkan menjadi 3 sub.

1. Karakteristik pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning* di SMP Negeri 1 Gubug.
2. Karakteristik fisik ruang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *Cooperative Learning* di SMP Negeri 1 Gubug.

3. Karakteristik hubungan guru dengan siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning* di SMP Negeri 1 Gubug.

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning* di SMP Negeri 1 Gubug.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik fisik ruang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *Cooperative Learning* di SMP Negeri 1 Gubug.
3. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik hubungan guru dengan siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning* di SMP Negeri 1 Gubug.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tentang pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning* di SMP Negeri 1 Gubug ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat / kegunaan, antara lain :

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan program pendidikan dan pengalokasian dana untuk melengkapi media pembelajaran yang dibutuhkan oleh sekolah.

2. Bagi SMP Negeri 1 Gubug, dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan media *cooperative learning*.
3. Bagi Komite Sekolah, dapat memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan prioritas kebutuhan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan.
4. Bagi Guru, dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan profesionalitas guru dalam pembelajaran dan mengajar di kelas.

#### **E. Daftar Istilah**

1. Pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang mengkombinasi sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. *Cooperative learning* adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.
3. Pengelolaan pembelajaran adalah perancangan, persiapan dan penggunaan semua komponen / fasilitas pembelajaran agar proses belajar mengajar di kelas dapat berjalan efektif dan efisien.